

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LKIP)

**KECAMATAN
BEKASI UTARA**

KOTA BEKASI

 021-8871674

 kecbekasiutara26@gmail.com

 bekasiutara

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP) setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun *Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah* (LKIP). LKIP merupakan bagian dari SAKIP yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan *Reformasi Birokrasi* Republik Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024 pada dasarnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan kinerja yang telah diperjanjikan selama perjalanan Tahun 2024.

Melalui penyampaian LKIP Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

CAMAT BEKASI UTARA,

SUMPONO BRAMA, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19800825 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN BEKASI UTARA	4
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	15
2.1 RENCANA STRATEGIS	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	34
3.3 REALISASI ANGGARAN	71
BAB IV PENUTUP	78
4.1 KESIMPULAN	78
4.2 RENCANA TINDAK	79

DAFTAR TABEL

Tabel1.1	Data Pendidikan PegawaiKecamatan Bekasi Utara	7
Tabel2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara	17
Tabel2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec Bekasi Utara	19
Tabel2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi	22
Tabel2.4	Alokasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan.....	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Ta 2024 ...	32
Tabel3.2	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Utara	35
Tabel3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama IndeksKepuasa Masyarakat terhadap Target Akhir RPD Tahun 2024-2026.....	35
Tabel3.4	Data Capaian Komponen Nilai AKIP Tahun 2023	55
Tabel3.5	Data Capaian Komponen Nilai AKIP Tahun 2024.....	55
Tabel3.6	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	56
Tabel3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara terhadap Target Akhir RPD Tahun 2024-2026	57
Tabel3.8	Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara.....	66
Tabel3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib Akhir RPD Tahun 2024-2026.....	67
Tabel3.10	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara hingga Target Akhir Renstra Tahun 2024-2026	70
Tabel3.11	Pagu Realisasi sesuai dengan Emonev Perprogram Tahun 2024	71
Tabel3.12	Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Perprogram Tahun Anggaran 2024	72
Tabel3.13	Jenis Belanja pada Kecamatan dan Kelurahan	76
Tabel3.14	Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Bagan struktur organisasiKecamatan Bekasi Utara	7
Gambar3.2 Diagram Jenis Belanja Pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024 berdasarkan pada Capaian *Indikator Kinerja Utama* (IKU) Kecamatan Bekasi Utara, yang bertolak ukur dari Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Utara untuk satu tahun anggaran yang terdapat dalam *Rencana Strategis* (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026. *Indikator Kinerja Utama* (IKU) Kecamatan Bekasi Utara berkaitan langsung dengan Misi Kota Bekasi yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maupun Sasaran yang ada pada Renstra Kecamatan

Bekasi Utara Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Utara yang pertama yaitu ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara***. Indikator Kinerja Utama ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara yaitu Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara. Penetapan Sasaran Strategis ini untuk menunjang Pencapaian *Pada Renstra Kecamatan Bekasi Utara* Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu ***“Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah”*** terutama dalam mencapai Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bekasi oleh karena itu Kinerja di Kecamatan Bekasi Utara harus meningkat, salah satunya adalah ***meningkatkan layanan publik*** dan Selain meningkatnya layanan publik, dapat pula diukur dengan ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*** yang berupa survey terhadap masyarakat mengenai pelayanan publik.
2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Utara yang kedua yaitu ***“Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara”*** Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara. Penetapan Sasaran Strategis ini untuk ketercapaian Renstra Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu ***“Meningkat Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara”***. Serta dapat di ukur melalui Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat.
3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Utara yang ketiga yaitu ***“Persentase Peningkatan wilayah yang Tertib”*** Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Kecamatan Bekasi Utara. Penetapan Sasaran Strategis ini untuk ketercapaian Renstra Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terdapat di dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ***“Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung***

Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat”.

Pembangunan suatu kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan. Kecamatan Bekasi Utara sebagai Perangkat Daerah yang dilimpahkan sebagian wewenang oleh Walikota, telah melaksanakan fungsinya dalam mewujudkan wilayah tertib K3.

Hal tersebut diukur dengan Persentase zona-zona yang telah tertib K3 di Wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2023 dimana *Indikator Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara* memperoleh nilai 72.74, *Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat* memperoleh capaian kinerja sebesar 84.84 persen, *Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib* memperoleh Persentase sebesar 60% maka pada tahun 2024 Kecamatan Bekasi Utara sudah mencapai Target.

Adapun rincian kinerja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk ***Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Utara*** pada Tahun 2024 memperoleh ***capaian kinerja sebesar 104.74 persen***, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi ***sebesar 84.84*** dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82.80 maka sudah mencapai target.
2. Untuk Indikator ***Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara*** memperoleh capaian kinerja sebesar ***72.74 persen***, capaian kinerja ini diperoleh dari perhitungan yang telah ditetapkan pada IKU Perangkat Daerah. dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 70 maka sudah mencapai Target.
3. Untuk ***Indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib*** di Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar ***105.26 persen***. Maka sudah mencapai Target.

Kecamatan Bekasi Utara memastikan bahwa persentase zonasi yang tertib, bersih, dan Indah di Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2024 terhadap Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara, terus berlanjut meningkat berdasarkan latar belakang diatas. Untuk membahas lebih lanjut kinerja

Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (Akuntabilitas Kinerja) pada laporan kinerja Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KECAMATAN BEKASI UTARA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Perangkat Daerah ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kecamatan dikategorikan sebagai *teritorial organization* serta memiliki kewenangan dalam pemerintahan, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut, terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Untuk melaksanakan **tugas pokok dan kewajibannya**, Kecamatan Bekasi Utara memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum

- dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
 - h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; serta
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat *eksternal*, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan

pembangunan; serta

5. Melaksanakan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Utara sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian Utara. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 19.65 Km², terdiri dari 6 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Perwira luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Harapan Jaya luas wilayah 206.60 Km;
- Kelurahan Marga Mulya luas wilayah 259.090000000 Ha;
- Kelurahan Harapan Baru luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Teluk Pucung luas wilayah 225.097200 Ha;
- Kelurahan Kaliabang Tengah luas wilayah 397.9870000 Ha.

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Barat Kota Bekasi;
- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

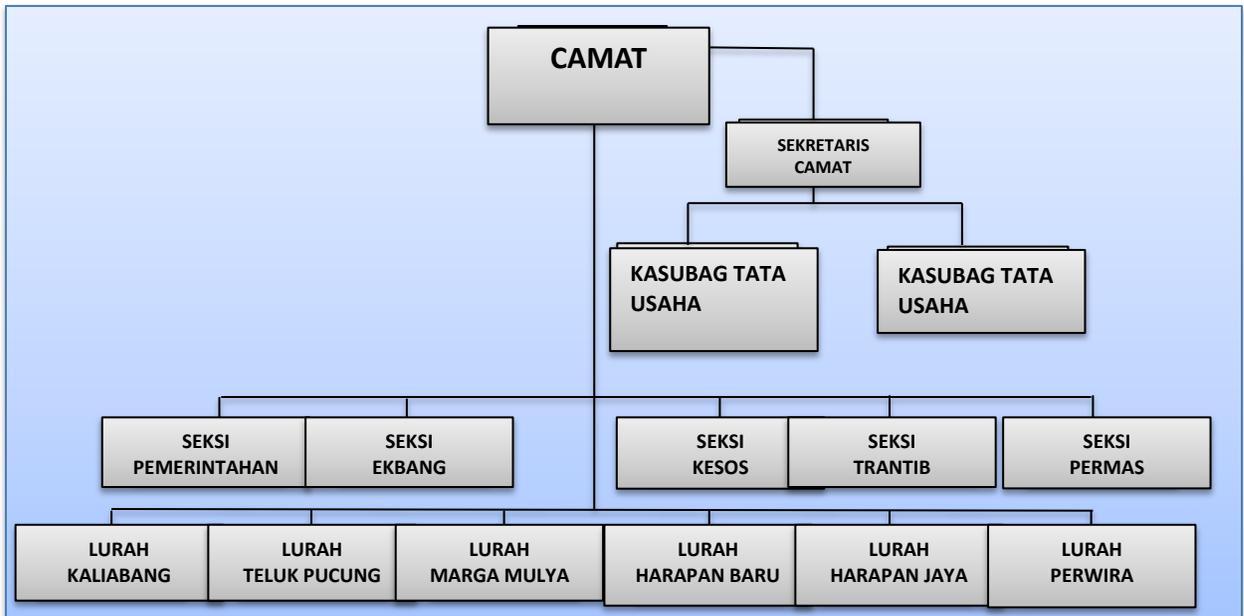
C. Susunan organisasi Kecamatan Bekasi Utara terdiri atas:

- Camat, membawahkan:
- Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Sub Bagian Keuangan.
- Kasi Ekonomi dan Pembangunan;
- Kasi Pemerintahan;
- Kasi Kesejahteraan Sosial;
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban;
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat;

- Lurah, membawahkan:
 - Sekretaris Kelurahan;
 - Kasi Permasbang;
 - Kasi Kesos;
 - Kasi Pemtrantib.
- Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bagan Struktur.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEKASI UTARA



Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu kesekretariatan, lima seksi, dua sub bagian, jabatan fungsional umum dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Bekasi Utara

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	73	-	11	42	3	15	2	-
2	TENAGA KONTRAK	231	-	3	105	11	111	1	-
	TOTAL	304		10	131	16	160	3	0

(Sumber : Data Kepegawaian KCBU 2024)

Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Bekasi Utara yaitu:

- **Seksi Pemerintahan**, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan, memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- **Seksi Kesejahteraan Sosial**, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah;
- **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan *Teknologi Tepat Guna* (TTG);
- **Seksi Ekonomi dan Pembangunan** mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat berkoordinasi dengan UPT terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait, mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait, membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan

UKM, mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;

- **Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban**, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah, memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan Koordinasi dengan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani kegiatan urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Berkaitan dengan pelayanan publik yang akan dihadapi Kecamatan Bekasi Utara tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan pembangunan Kota Bekasi.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, profesionalitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan yang baik.

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

A. KEGIATAN KECAMATAN BEKASI UTARA

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2024 terdiri dari :

I. Belanja Penunjang Langsung Urusan (BLPU)**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota****a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu;
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Belanja Langsung Urusan (BLU)

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- (1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Bekasi Utara;
- (2) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Perwira;
- (3) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan MargaMulya;
- (4) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Harapan Jaya;
- (5) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Harapan Baru;
- (6) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kaliabang Tengah;
- (7) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Teluk Pucung.

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;

- (2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perwira;
- (3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan MargaMulya;
- (4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Jaya;
- (5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru;
- (6) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ka Tengah;
- (7) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Pucung;
- (8) Evaluasi Kelurahan.

2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- (1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Perwira;
- (2) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan MargaMulya;
- (3) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Harapan Jaya;
- (4) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Harapan Baru;
- (5) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kaliabang Tengah;
- (6) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Teluk Pucung;
- (7) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- (1) Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. LAYANAN PRODUK KECAMATAN BEKASI UTARA

Produk layanan yang terdapat di Kecamatan Bekasi Utara adalah sebagai berikut :

- a) Seksi Ekonomi dan Pembangunan terdapat layanan:
 1. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Surat Ijin Pemasangan Reklame;

3. Surat Rekomendasi Pendirian Tower BTS;
 4. Surat Pernyataan Kesanggupan (SPK).
- b) Seksi Pemerintahan terdapat layanan :
1. Surat Keterangan Waris;
 2. Surat Keterangan Peralihan Hak Tanah.
- c) Seksi Kesejahteraan Sosial terdapat layanan :
1. Surat Rekomendasi Nikah Non Muslim;
 2. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
 3. Surat Keterangan Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah;
 4. Surat Rekomendasi Yayasan, Klinik, dan Sekolah;
 5. Surat Keterangan Belum Menikah dan;
 6. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Dalam mendukung pelayanan yang prima dan mempermudah birokrasi pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat Kecamatan Bekasi Utara memfasilitasi pelayanan kependudukan yang menjadi produk layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti Pengantar Surat Pindah, Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman dan Pencetakan e-KTP, Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Akte Kematian dan Akte Kelahiran.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Kec Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Kec Bekasi Utara sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam *Rencana Strategis* (Renstra), yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam *Rencana Kinerja* (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bekasi Utara didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Bekasi Utara Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dengan target satuan berupa persentase (%), nilai, unit, dan jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Bekasi Utara ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD) Kota Bekasi.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Utara telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat Dilaksanakannya *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (Musrenbang), Forum SKPD,

sehingga Renstra Kecamatan Bekasi Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bekasi Utara dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bekasi Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam *Rencana Kerja* (Renja) Bekasi Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Bekasi Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bekasi Utara

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari Pernyataan Misi Kota Bekasi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Utara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:

1. ***Terwujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inoatif dan Akuntabel.***

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi*.

2. ***Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman***

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator *Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum*.

B. Sasaran Kecamatan Bekasi Utara

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dicapai oleh Kecamatan Bekasi Utara untuk jangka waktu 3 tahun ke depan. Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara periode 2024-2026.

Kecamatan Bekasi Utara menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik;

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara;

3. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				I	II	III
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bekasi Utara	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	81	81.50	82
		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	70	71	72
2.	Terwujudnya Kecamatan Bekasi Utara yang Tertib Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	57%	60%	61%

Sumber Data : Renstra Kec. Bekasi Utara Ta. 2024-2026

2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024 terdapat *Indikator Kinerja Utama* (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi yang di emban. Untuk Kecamatan Bekasi Utara mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Target Tahun 2024
				Alasan	Formulasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat mealui kuesioner yang terdiri dlari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kec Bekasi Utara adalah masyarakat yang menerima layanan	81
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah maerupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	70
2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persentase	Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa Wilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	$\frac{\text{Jumlah zonasi K3 yang ditertibkan}}{\text{Jumlah seluruh zonasi K3 yang ditetapkan di wilayah kecamatan Bekasi Utara}} \times 100\%$	57%

Sumber Data : Renstra Tahun 2024-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan.

Berdasarkan pada *Rencana Kerja* (Renja) Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan *isu strategis* Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi, serta usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Program pada Pemerintah Kota Bekasi pada Kecamatan Bekasi Utara yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Kabupaten/Kota;
- (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- (4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program-program pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja. Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Berikut sasaran strategis Kecamatan Bekasi Utara, yaitu:

- a. Sasaran Strategis Kesatu yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah*. Dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai yaitu : *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara*. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:
 - (1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - (2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik;

(3) Program Penanganan Urusan Pemerintahan Umum.

- b. Sasaran Strategis Kedua yaitu *Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara*. Dalam sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dicapai yaitu “*Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara*”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Utara melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Sasaran Strategis Ketiga yaitu “*Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat*”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Utara melaksanakan 1 (satu) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Perjanjian Kinerja Camat Bekasi Utara selaku Kepala Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan. Indikator Perjanjian Kinerja adalah IKU Kecamatan Bekasi Utara dengan target yang disesuaikan dengan kondisi wilayah di Kecamatan Bekasi Utara. Berikut tabel Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan Camat Bekasi Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	81	Triwulan I	-
					Triwulan II	77.80
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	89.71
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	70	Triwulan I	-
					Triwulan II	72.74
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	-
3.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persentase	57%	Triwulan I	10%
					Triwulan II	20%
					Triwulan III	10%
					Triwulan IV	17%

Sumber Data : Lampiran Perkin Kinerja Eselon III Kec. Bekasi Utara

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana	Alokasi			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Bekasi Utara)	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000	-	-	-
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Bekasi Utara)	14.921.107.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.396.370.176	4.110.208.132	3.350.345.346	4.064.183.346
3		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Bekasi Utara)	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000	-	-	-
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Bekasi Utara)	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10.000.000	-	-
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bekasi Utara)	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	-	-	-
6			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bekasi Utara)	320.321.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	320.321.500	-	-	-
7			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (Kecamatan Bekasi Utara)	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	-	-	-
8			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Bekasi Utara)	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
9			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Bekasi Utara)	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.570.000	3.500.000	3.000.000	1.930.000
10			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Bekasi Utara)	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.500.000	32.500.000	30.000.000	15.000.000
11			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Bekasi Utara)	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000	-	-	-

12		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Bekasi Utara)	636.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.500.000	127.500.000	127.500.000	127.500.000
13			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Bekasi Utara)	12.530.795.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.475.195.020	3.016.680.030	3.016.680.030	4.022.240.040
14		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Bekasi Utara)	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.500.000	-	47.500.000	-
15			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Bekasi Utara)	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	-	100.000.000	-
16			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Bekasi Utara)	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.500.000	72.500.000	-	-
17			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Bekasi Utara)	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000	-	-	-
18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Bekasi Utara)	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.350.000	16.150.000	3.400.000	2.100.000
19		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Bekasi Utara)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.580.000	22.087.000	-	333.000
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Bekasi Utara)	140.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.000.000	-	-	-

21			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bekasi Utara)	644.007.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.654.000	130.937.000	369.740.000	73.676.000
22			Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Bekasi Utara)	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.185.000	10.815.000	-	-
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan Bekasi Utara)	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	21.010.000	46.180.000	12.810.000
23	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Bekasi Utara)	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.348.000	48.495.000	20.157.000	-
24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Ka Daerah	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Bekasi Utara)	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	29.595.000	10.405.000	-
25	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Teluk Pucung)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.977.000	10.523.000	10.500.000	7.000.000
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Telukpucung)	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	200.000.000	-	-
27			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Telukpucung)	3.278.992.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	755.983.800	1.006.720.800	755.983.800	760.303.800
28		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Telukpucung)	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	-	-

29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Perwira)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.660.000	3.780.000	5.040.000	2.520.000
30	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Perwira)	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	200.000.000	-	-
31			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Perwira)	1.658.243.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	365.820.800	553.514.800	372.450.800	366.456.800
32		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Perwira)	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	-	-
33	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Kali abang Tengah)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.624.000	5.624.000	30.066.000	8.686.000
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kali abang Tengah)	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	200.000.000	-	-
35			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaliabang Tengah)	3.301.815.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	776.064.000	956.064.000	786.225.000	783.462.240
36		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kaliabang Tengah)	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	-	-
37	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Harapanjaya)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.800.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000

38	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Harapanjaya)	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	200.000.000	-	-
39		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Harapan Jaya)	3.066.189.260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	710.000.000	903.435.000	724.200.000	728.554.260
40		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Harapanjaya)	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	-	-
41	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Harapan Baru)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.600.000	8.400.000	8.400.000	5.600.000
42	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Harapanbaru)	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	200.000.000	-	-
43			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Harapan Baru)	1.569.675.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	343.702.200	530.592.200	351.092.200	344.288.420
44		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Harapan Baru)	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	-	-
45	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Margamulya)	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000
46	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Belanja Modal Taman	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	200.000.000	-	-

47		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Margamulya)	1.170.343.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	242.888.000	432.282.300	252.282.300	242.891.380
48		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Margamulya)	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	20.000.000	-	-
JUMLAH				46.273.489.520		10.882.693.496	13.448.313.262	10.441.547.476	11.585.935.286

Sumber Data : Alokasi Keuangan Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Bekasi Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bekasi Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan *Perjanjian Kinerja* (Perkin), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKIP). Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun *Rencana Kerja* (Renja) Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2024 dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 untuk pengukuran kinerja telah ditetapkan 3 (dua) Sasaran Strategis dan terdapat 3 (empat) Indikator Sasaran yang diukur dari berbagai kegiatan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Sasaran pada *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah* (LKIP) Kecamatan Bekasi Utara adalah sasaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2018-2023, yang selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja utama dan realisasi capaiannya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Renstra	Realisasi Capaian	Capaian Kinerja (%)	KET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	81	84.84	104.74	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	70	72.74	103.91	Tercapai
2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	57%	60%	105.26	Tercapai

Sumber Data : Subag Tata Usaha/Perencanaan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024, Diolah.

Dari tabel diatas Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara, Untuk mencapai **sasaran strategis yang pertama** yaitu: *Meningkatnya Akuntabilita dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah*, diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu:

(1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Utara, dengan realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 84.84 dan rasio sebesar 104.74%. Indikator ini telah terpenuhi sesuai dengan target penentuan pada IKU, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, sehingga capaian target pada tahun 2024 pada indikator ini termasuk dalam kategori baik;

Sasaran **Strategis yang kedua** yaitu *Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara* yaitu :

(1) Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara dengan realisasi capaian pada Tahun 2024 sebesar 72.74 dan rasio sebesar 103.91%. Indikator ini telah terpenuhi sesuai dengan target penentuan pada IKU, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, sehingga capaian target pada tahun 2024 pada indicator ini termasuk dalam kategori baik;

Sasaran **Startegis yang ketiga** yaitu *Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat* yaitu :

(1) Presentase Peningkatan Wilayah yang Tertib, Aparatur Kelurahan dan Kecamatan tetap melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan Kantor. Dengan begitu, target yang ada sebesar 80% dapat tercapai dengan besaran nilai yang sama yaitu 80%, dan target capaian realisasi di akhir tahun 2023 mampu mencapai angka persentase sebesar 100%.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Analisis Pencapaian Kinerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024 sesuai dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang berdasarkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Bekasi Utara secara rinci sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah

3.2.1.1 Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berupa angka melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaran pelayanan publik.

Unit Pelayanan publik adalah aparatur Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Penerima layanan adalah masyarakat yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara dengan Indikator Kinerja Kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dengan survey kepuasan masyarakat. Pengukuran IKM diatur dalam KEPMENPAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 yaitu data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaran pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Keputusan Camat Bekasi Utara tentang Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Bekasi

Utara Kota Bekasi Tahun 2024.

Berdasarkan hasil capaiannya, Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bekasi Utara Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Utara

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	81	84.84	104.74%

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.6 Indikator Kinerja yang pertama ini yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat* Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2024 realisasinya melampaui target yaitu sebesar 84.84 yang dimana targetnya sebesar 81 sehingga Capaian Kinerja atas Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 104.74% yang dapat diartikan Indikator Kinerja ini terpenuhi dan mencapai target atau bahkan.

Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bekasi Utara, dan jika dibandingkan sampai dengan target RPJMD Tahun 2024-2026 untuk capaian indikator ini sebesar 81 sehingga untuk pemenuhan target sampai dengan kondisi akhir RPJMD 2024-2026 yaitu sebesar 84.84 Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Target Akhir RPJMD 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Target RPD 2024-2026	Target Renstra Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100	82.50	82.80	81	82.71	83.17	84.84	100	102	104.74

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 capaian Realisasi nya sebesar 84.84 dari target yang ditetapkan yaitu 81 sehingga rasio capaiannya adalah 104.74 %

mengalami kenaikan dari target yang ditentukan dan pada Tahun 2024 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaian realisasinya sebesar 104.74% sehingga hal ini telah melebihi capaian target pada Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja dalam sasaran strategis yang berhasil tercapai dan melampaui target dengan kriteria baik. Hasil Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024 didapatkan nilai sebesar **84.84** dengan mutu pelayanan dalam kategori **B** (Baik).

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara dilakukan dengan mengukur 7 (tujuh) jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara yaitu di antaranya:

- 1)Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- 2)Pelayanan Peralihan Hak Tanah;
- 3)Pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan;
- 4)Pelayanan Surat Keterangan Waris;
- 5)Pelayanan Surat Keterangan Belum Nikah;
- 6)Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian;
- 7)Pelayanan Surat Rekomendasi Nikah Non Muslim.

Adapun Keberhasilan realisasi *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bekasi Utara* yang nilainya melampaui target didukung oleh beberapa hal yaitu diantaranya:

- a. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang cukup memadai, dimana Ruang Pelayanan Kecamatan Bekasi Utara yang cukup memadai dan kondusif sebagai tempat untuk menunggu antrian dirasakan masyarakat cukup nyaman. Desain loket pelayanan juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis aplikasi e-Open yang cukup memadai, dimana warga kota bekasi dapat mengajukan permohonan kependudukan dimana saja dan kapan saja;

- b. Kependudukan dengan menggunakan *smartphone* dari rumah tanpa harus datang ke Kantor Kecamatan Bekasi Utara Tidak hanya itu, masyarakatpun tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan Bekasi Utara;
- c. Berkas yang sudah selesai akan diantar kerumah oleh Satuan Petugas Pantauan dan Monitoring (SATGAS PAMOR) dan adanya pelaksanaan POJOK PAMOR di setiap wilayah sesuai dengan jumlah Pamor masing-masing wilayah, terdapat sarana pengaduan dan permohonan informasi, dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi. Hal ini dimanfaatkan oleh Kecamatan Bekasi Utara dalam memberikan pelayanan.
- d. Saat ini Kecamatan Bekasi Utara memiliki beberapa kanal pengaduan maupun permohonan informasi secara online seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Website*. Selain itu, Kecamatan Bekasi Utara juga memiliki sarana loket pengaduan dan kotak saran pengaduan yang ditempatkan di depan ruang pelayanan. Kecamatan Bekasi Utara juga berintergrasi dengan pemerintah Kota Bekasi dalam penyebarluasan informasi dan pengaduan seperti *call center, POT* dan *Patriot Quick Response*;
- e. Implementasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) yang menjadi program Kemendagri yang telah diterapkan di seluruh Indonesia memberi manfaat yang banyak di Kecamatan Bekasi Utara. Kini masyarakat tidak perlu bingung dalam mendapatkan pelayanan. Dengan datang ke loket pelayanan, warga masyarakat akan diarahkan ke seksi dimana masyarakat tersebut akan mengurus dokumen perijinan maupun non perijinan. Optimalisasi peran Satgas Pamor dalam melakukan pelayanan *door to door* ke masyarakat;
- f. Program pemerintah Kota Bekasi dalam memaksimalkan pelayanan jemput bola ke warga dengan memaksimalkan peran Satgas Pamor. Setiap RW di Kecamatan Bekasi Utara memiliki 1

(satu) orang satgas pamor yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada warga. Jika warga kesulitan baik jarak maupun waktu, Satgas Pamor dengan sigap membantu mengurus dokumen ke Kecamatan dan Kelurahan dengan tidak dipungut biaya (gratis);

g. Keberhasilan pencapaian Nilai IKM tersebut tidak terlepas dari adanya *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum* serta aspek lain yang mendukung pencapaian Indikator Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024 adalah oleh Beberapa Sub Kegiatan dalam *Program yang pertama* adalah

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan Sub Kegiatan Berikut diantaranya adalah:

1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 644.007.000 dan terealisasi sebesar Rp.542.033.100 atau sebesar 84.17% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kader posyandu, pkk, pkp kecamatan, serta kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI, juga untuk kegiatan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan kota, serta untuk penunjang kegiatan pemuka umat beragama, majelis umat beragama dan pemelihara rumah ibadah dengan target kinerja yang tertera pada tabel berikut dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	644.007.000	542.033.100	84.17
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	194 Pokmas/Ormas	194 Pokmas/Ormas	100%

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perwira

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.688.243.200 dan terealisasi sebesar Rp. 1.679.337.268 atau 99.47% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Perwira dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 158 Pokmas/Ormas dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	1.688.243.200	1.679.337.268	99.47%
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158 Pokmas/Ormas	158 Pokmas/Ormas	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Marga Mulya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.287.943.980 dan terealisasi sebesar Rp. 1.283.859.100 atau 99.68% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Marga Mulya dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 101 Pokmas/Ormas dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	1.287.943.980	1.283.859.100	99.68%
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	101 Pokmas/Ormas	101 Pokmas/Ormas	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Jaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.069.189.260 dan terealisasi sebesar Rp. 3.073.852.400 atau 99.28% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Harapan Jaya dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 418 Pokmas/Ormas dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	3.096.189.260	3.073.852.400	99.28%
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	418 Pokmas/Ormas	418 Pokmas/Ormas	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harapan Baru

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.617.675.020 dan terealisasi sebesar Rp. 1.597.605.800 atau 98.76% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Harapan Baru dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 161 Pokmas/Ormas dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	1.617.675.020	1.597.605.800	98.76%
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di Kelurahan	161 Pokmas/ Ormas	161 Pokmas/ Ormas	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.331.815.240 dan terealisasi sebesar Rp. 3.311.864.302 atau 99.40% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Kaliabang Tengah dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 357 Pokmas/Ormas dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	3.331.815.240	3.311.864.302	99.40%
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357 Pokmas/ Ormas	357 Pokmas/ Ormas	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Pucung

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.308.992.200 dan terealisasi sebesar Rp. 3.293.013.300 atau 99.52% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rutin RT, RW, Kader posyandu, pkk, pkp serta MUB dan pemuka umat beragama yang ada di lingkungan Kelurahan Teluk Pucung dengan target kinerja masing-masing kegiatan yang ada yaitu 357 Pokmas/Ormas dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	3.308.992.200	3.293.013.300	99.52%
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357 Pokmas/ Ormas	357 Pokmas/ Ormas	100

8. Evaluasi Kelurahan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.14.286.100,- atau 22.81% dari target anggaran yang ada. sisa anggaran sebesar Rp. 45.713.900,- atau tidak dilaksanakan. atau terserap 0% dikarenakan kecamatan tidak melakukan lomba evaluasi kinerja antar kelurahan. Karena Kecamatan Bekasi Utara tidak masuk dalam Nominasi penilaian Ekspose yang diadakan di Kota Bekasi oleh bagian Tapem. Karena sistem penilaian di tahun ini menggunakan sistem penunjukan sebagai perwakilan antar SKPD bukan sistem Lomba antar Kecamatan. Dengan target kinerja 6 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	60.000.000	14.286.100	22.81
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6Laporan	6Laporan	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.140.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 134.717.250 atau 96.23% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pra musrenbang dan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan di Bekasi Utara dengan target kinerja 7 Lembaga dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	140.000.000	134.717.250	96.23
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	7 Lembaga	100

10. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Perwira

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Perwira dengan target kinerja 2 Lembaga dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40.000.000	40.000.000	100 %
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Laporan	12 Laporan	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

11. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Margamulya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Margamulya dengan target kinerja 2 Lembaga dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40.000.000	40.000.000	100
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

12. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Harapan Jaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 93.50% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Harapan Jaya dengan target kinerja 2 Lembaga dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40.000.000	40.000.000	100
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

13. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Harapan Baru

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 68.000.000 atau 97.14% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Harapan Baru dengan target kinerja 2 Lembaga dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40.000.000	40.000.000	100%
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

14. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kaliabang Tengah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100%

dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan target kinerja 2 Lembaga dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40.000.000	40.000.000	100
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perwira

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di Kelurahan Teluk Pucung dengan target kinerja 1 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40.000.000	40.000.000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100

16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Marga Mulya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun yang ada di Kelurahan Teluk Pucung dengan target kinerja 1 Unit dan telah

berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200.000.000	200.000.000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1Unit	1Unit	100

17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Jaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan target kinerja 1Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200.000.000	200.000.000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100

18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun yang ada di Kelurahan Perwira dengan target kinerja 1 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200.000.000	200.000.000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1Unit	1Unit	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliabang Tengah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun yang ada di Kelurahan Harapan Jaya dengan target kinerja 1 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200.000.000	200.000.000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Pucung

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun yang ada di Kelurahan Harapan Baru dengan target kinerja 1 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100% walaupun dengan target anggaran yang nihil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	200.000.000	200.000.000	100
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1Unit	1Unit	100

Ada 20 (dua puluh) sub kegiatan yang menunjang ketercapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan, keseluruhan sub kegiatan tersebut berhasil tercapai. Minimnya hambatan sehingga ketercapaian realisasi kinerja berhasil diangka persentase 100% dan persentase capaian keuangannya yaitu 96.20% namun capaian keduanya dianggap perlu ditingkatkan dan dipertahankan.

Selain itu, meskipun Capaian Nilai IKM diatas 100%, namun dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan SOP Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Bekasi Utara sehingga masyarakat masih sulit mengakses persyaratan yang ditentukan;
2. Terdapat perbedaan kebijakan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain sehingga masyarakat akan membandingkan pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara dengan kecamatan lainnya; Tidak dilakukannya sosialisasi perubahan kebijakan secara optimal sehingga sering terjadi keterlambatan informasi kepada petugas *front office*.

2) Program yang kedua adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Sub Kegiatan Berikut diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	50.000.000	47.627.500	96.26
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 47.627.500 atau 96.26% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pengadaan sarana penunjang ruang pelayanan dan pengadaan peralatan pendukung pelayanan dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%.

2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bekasi Utara

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.15.499.000 atau 51.66% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kecamatan Bekasi Utara dengan target kinerja 10 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	30.000.000	15.499.000	51.66
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Dokumen	10 Dokumen	100

3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Perwira

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	50.000.000	48.508.000	97.02
Keluaran	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Perwira	15 Dokumen	15 Dokumen	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.508.000 atau 97.02% dari target anggaran yang ada. Alokasi

dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Perwira dengan target kinerja 15 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%.

4. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Marga Mulya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.45.544.000 atau 91.09% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Marga Mulya dengan target kinerja 20 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	50.000.000	45.544.000	91.09
Keluaran	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Marga Mulya	20 Dokumen	20 Dokumen	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

5. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Harapan Jaya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.44.788.800 atau 89.58% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Harapan Jaya dengan target kinerja 18 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	50.000.000	44.788.8000	89.58
Keluaran	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel Harapan Jaya	18 Dokumen	18 Dokumen	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

6. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Harapan Baru

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.358.000 atau 96.72% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Harapan Baru dengan target kinerja 18 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	50.000.000	48.358.000	96.72
Keluaran	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kel Harapan Baru	18Dokumen	18Dokumen	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

7. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Kaliabang Tengah

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.39.727.250 atau 79.45% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan target kinerja 20 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	50.000.000	39.727.250	79.45
Keluaran	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kaliabang Tengah	20 Dokumen	20 Dokumen	100

8. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Teluk Pucung

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 49.481.000 atau 98.96%

dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di Kelurahan Teluk Pucung dengan target kinerja 20 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	50.000.000	49.481.000	98.96
Keluaran	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Pucung	20 Laporan	20 Laporan	100

Ada 8 (Delapan) sub kegiatan yang menunjang ketercapaian *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik* dan keseluruhan sub kegiatan tersebut berhasil tercapai. Minimnya hambatan sehingga ketercapaian realisasi kinerja berhasil diangka persentase 100% namun capaian masih dianggap perlu ditingkatkan dan dipertahankan.

3) *Program yang kedua* adalah Program Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum dengan Sub Kegiatan Berikut diantaranya adalah:

1. Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.138.500 atau 97.85% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan Konflik atau Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan di Kelurahan Teluk Pucung dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	40.000.000	39.138.500	97.85
Keluaran	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Teluk Pucung	20 Laporan	20 Laporan	100

Selain itu, meskipun Capaian Nilai IKM diatas 100%, namun dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan SOP Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Bekasi Utara sehingga masyarakat masih sulit mengakses persyaratan yang ditentukan;
2. Terdapat perbedaan kebijakan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain sehingga masyarakat akan membandingkan pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara dengan kecamatan lainnya;
3. Tidak dilakukannya sosialisasi perubahan kebijakan secara optimal sehingga sering terjadi keterlambatan informasi pada petugas *front office*.

Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Unit Pelayanan Publik pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik Tahun 2024. Untuk Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Tahun 2024 telah Melampaui Target. Adapun Faktor tercapainya Target Tahun 2024 dipengaruhi oleh Beberapa Faktor Antara Lain:

1. Pelayanan Prima yang diberikan Oleh Petugas Pelayanan kepada Masyarakat Turut Menjadi Salah Satu Faktor yang Meningkatkan Nilai IKM pada Tahun ini Sehingga Masyarakat merasa Terlayani dengan Baik;
2. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai untuk Masyarakat Dalam Mendapatkan Pelayanan, akan tetapi Pada Tahun 2024 akan dilakukan Perbaikan Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu Agar Masyarakat Semakin Nyaman dalam Mendapatkan Pelayanan di Kecamatan Bekasi Utara.

Beberapa Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan Dalam Pencapaian Memenuhi Target Pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh Beberapa Faktor yaitu:

- (1) Masyarakat Merasa Sangat Puas dengan Tidak adanya lagi Biaya pada Saat Melakukan Pelayanan;
- (2) Pelayanan yang Dilakukan Tepat Waktu;
- (3) Pelayanan yang dilakukan Melalui Petugas Pamor pada Masing-Masing Wilayah RW di Setiap Kelurahan;
- (4) Kualitas Kedisiplinan Pelayanan yang diberikan Secara Konsisten dalam melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Didalam Upaya Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Maka dilakukan Perbaikan Ke Depan:

- 1) Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat di dalam Kelengkapan Pengurusan Pelayanan;
- 2) Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terhadap Pelayanan yang sudah dapat dilakukan secara Online;
- 3) Melakukan Pelayanan dengan Cara Menjemput Bola langsung melalui Pamor di Wilayah Masing-Masing.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara.

3.2.2.1 Indikator Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara

Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digambarkan dalam *Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*. Kinerja dan layanan yang berada di Kecamatan Bekasi Utara dapat meningkat sejalan dengan pencapaian nilai AKIP yang menjadi urusan Peran teknis terkait. Kecamatan Bekasi Utara memiliki 4 Komponen yang dinilai, untuk pencapaian target indikator ini yaitu harus memenuhi target nilai sebesar 70 dari 4 yang ada, dan Kecamatan Bekasi Utara berhasil mendapatkan nilai AKIP sebesar 72.74 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Adapun Capaian nilai tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Terdapat 5 Program yang diampu Kecamatan Bekasi Utara dengan 12 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan Persentase Capaian Nilai yang Meningkat di Kecamatan Bekasi Utara adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Capaian Nilai LHE AKIP} / \text{Target NILAI LHE} \\
 &\quad \text{AKIP} \times 100\% \\
 &= 71 / 72.74 \times 100\% \\
 &= 103.91\%
 \end{aligned}$$

Maka analisis persentase capaian yang meningkat di Kecamatan Bekasi Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Data Capaian Komponen Nilai AKIP Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	2023	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23.43
2	Pengukuran Kinerja	30	20.84
3	Pelaporan Kinerja	15	11.11
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.37
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72.75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023, diolah

Tabel 3.5
Data Capaian Komponen Nilai AKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23.62
2	Pengukuran Kinerja	30	20.64
3	Pelaporan Kinerja	15	11.11
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.37
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72.74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2024, Diolah

Dengan melihat komponen penilaian diatas, maka tercapainya indikator sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2024 dapat dintrestasikan dengan kategori Baik dengan memperoleh nilai 72.74 atau predikat Baik. Akan tetapi walaupun Kecamatan Bekasi Utara mendapatkan predikat Baik tetapi masih ada beberapa rekomendasi yang harus di perbaiki atau dievaluasi oleh Kecamatan Bekasi Utara demi meningkatkan Nilai AKIP pada Tahun 2024 yaitu antara lain:

- (1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja agar sesuai Standar dengan Menyelaraskan Substansi seluruh Dokumen Perencanaan, Baik antar Dokumen Perencanaan maupun substansi dari antar Bab dalam Dokumen Perencanaan;
- (2) Melakukan Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja untuk Mewujudkan Capaian Kinerja yang Efektif, Efisiensi dilakukan secara berjenjang dan Berkelanjutan, diantaranya dengan :

- a. Meningkatkan Kepedulian dan Pemahaman atas Pengukuran Kinerja Pegawai sehingga Paham dan Peduli dengan Target Capaian yang telah Ditetapkan dan Diperjanjikan, Kemudian dari Hasil Pengukuran Kinerja dapat Dimanfaatkan untuk Rotasi/Mutasi atau *Reward/Punishment Pegawai*;
 - b. Melakukan Reviu terhadap Program dan Kegiatan agar seluruhnya Mendukung tercapainya Sasaran Kecamatan Bekasi Utara;
- (3) Meningkatkan Kompetensi dari SDM penyusun Laporan Kinerja sehingga Kualitas Laporan Kinerja lebih Relevan dan Bermanfaat untuk Perbaikan Perencanaan Kinerja dan Peningkatan Capaian Kinerja;
 - (4) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Evaluasi Internal dengan Memperhatikan Target dan Realisasi Capaian, Mempertajam Analisis Pencapaian Kinerja sehingga Dapat diketahui Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan yang sebenarnya dan Mengetahui Tindak Lanjut apa yang Dilakukan untuk Rencana Tindak Triwulan sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat 4 komponen penilaian yang menjadi penunjang hasil akhir Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara. Dari keempat komponen di atas semua komponen telah mencapai Nilai Target yang telah di tentukan. Dalam Pencapaian Sasaran Strategis *Meningkatnya Kaulitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara* dengan Indikator Kinerja yaitu, *Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara* dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.6
Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP
Kecamatan Bekasi Utara

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	Nilai	70	72.74	103.91%

Pada tabel 3.4 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu **Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara**, realisasi pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 100% dengan capain kinerja 100%, adapun pada Renstra dan RPD yaitu dengan nilai 70 target RPD Tahun 2024-2026 untuk capaian indikator Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara dibanding dengan capaian nilai di tahun sebelumnya pada tahun 2024 dapat dibilang menurun. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP
Kecamatan Bekasi Utara terhadap Target Akhir RPJMD 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPD 2024-2026	TARGET RENSTRA TAHUN Ke -		REALISASI CAPAIAN TAHUN Ke -		RASIO CAPAIAN TAHUN Ke -	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
			1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	72.05	72.50	70	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara merupakan indikator baru pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan *Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026*, sehingga indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara dijadikan indikator untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik pada Kecamatan Bekasi Utara.

Adapun Faktor keberhasilan pencapaian target 2024 di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara mengacu pada peran aktif aparatur sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara;
2. Melakukan Monitoring setiap triwulan terhadap capaian kinerja sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
3. Adanya peran serta Aparatur di Kecamatan Bekasi Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

Target yang ada untuk nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara adalah 72.74 capaian di tahun 2024 sudah memenuhi target, yang di tentukan sebesar 70 dengan capaian persentase Kinerja sebesar 104.74%, dapat dilihat pada tabel di atas jika dibandingkan dengan capaian atau realisasi nilai di tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 adalah 72.75 atau dengan persentase 100.27% dari target yang ada yaitu 72.50, Realisasi Kinerja Kegiatan dan sub kegiatan dirinci sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp.0.- atau 0%. Kegiatan ini tidak di Realisasikan di karenakan untuk Kegiatan Cetakan pada Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sudah ada pada Kegiatan Cetakan dan Penggandaan dan dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk menyusun dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dengan target kinerja 6 laporan.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	3.000.000	0	0
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.046.107.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.358.939.493 atau 95.43% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan target kinerja 2.110 Orang/Bulan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	15.046.107.000	14.358.939.493	95.43%
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.218 Orang/Bulan	2.218 Orang/Bulan	97.86%

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.984.750 atau 66.16% dari target anggaran yang ada. Masih ada Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.984.750.- di karenakan yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	3.000.000	1.984.750	66.16
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100

Sumber Data: Data Olahan Su Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dari target anggaran yang ada. Kegiatan ini di cairkan sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, sudah di anggarakan pada BKPSDM Kota Bekasi. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur di kecamatan dan kelurahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	10.000.000	0	0
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	0

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.909.200 atau 99.55% dari target anggaran yang ada dan berhasil tercapai. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian komponen listrik dan atau penerangan bangunan kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 1 Paket dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	20.000.000	19.909.2000	99.55
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 320.321.500 dan terealisasi sebesar Rp. 302.987.400 atau 94.59% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian alat dan bahan pembersih, pembelian alat tulis kantor dan bahan komputer, serta pembelian makanan dan minuman pegawai kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 60 Paket telah

berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	320.321.500	302.987.400	94.59
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60Paket	60Paket	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 71.132.750 atau 71.13% dari target anggaran yang ada dan berhasil tercapai. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyediaan barang cetak dan penggandaan di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 2 Paket telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%.

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	100.000.000	71.132.750	71.13
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000 atau 100% dari target anggaran yang ada. Tidak terserap keseluruhan dikarenakan pencapaian sesuai dengan tagihan yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 150 Dokumen dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	20.000.000	20.000.000	100
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	150 Dokumen	150 Dokumen	100

9. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dari target anggaran yang ada. Sub Kegiatan ini tidak di Realisasikan dikarenakan telah menggunakan Mamin Rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu di kecamatan dan kelurahan dengan target 12 Laporan serta telah berhasil mencapai target dengan persentase Kinerja sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	10.000.000	0	0
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 138.168.000 atau 86.36% dari target anggaran yang ada. Tidak terserap keseluruhan karena yang dicairkan mamin rapatnya saja. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	160.000.000	138.168.000	86.36
Keluaran	Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Perjalanan Dinas	12Laporan	12Laporan	100

11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.976.600 atau 99.53% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk membeli lemari Arsip dengan target kinerja 12Dokumen dan telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	5.000.000	4.976.600	99.53
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 576.306.000 dan terealisasi sebesar Rp. 493.534.418 atau 85.54% dari target anggaran yang ada. terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 81.771.582,- Tidak terserap keseluruhan di karenakan Pencairan disesuaikan dengan Jumlah Daya yang ada pada Kecamatan. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik di kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan persentase Kinerja sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	576.306.000	493.534.418	85.54
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.530.795.120 dan terealisasi sebesar Rp. 11.842.880.835 atau 94.51% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk penggajian tenaga administrasi/teknis perkantoran dan penggajian tenaga kebersihan di kantor kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 12 Laporan serta telah berhasil mencapai target dengan persentase kinerja sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	12.530.795.120	11.842.880.835	94.51
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 70.914.800 atau sebesar 61.67% dari target anggaran yang ada, tidak terserap keseluruhan karena pembayaran sesuai dengan tagihan yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian bensin, pemeliharaan rutin/*service* kendaraan dinas/operasional di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 2 unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	115.000.000	70.914.800	61.67
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Lapangan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 244.694.000 dan terealisasi sebesar Rp. 205.826.440 atau realiasi sebesar 84.12% dari target anggaran yang ada. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.38.867.560,- Tidak terserap keseluruhan dikarenakan pencairan disesuaikan dengan permohonan Service atau Nota Dinas yang diajukan oleh masing-masing pemilik kendaraan dinas di Kecamatan Bekasi Utara. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian bensin, pemeliharaan rutin/*service* kendaraan dinas/operasional di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja 44 unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase 100%.

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	244.694.000	205.826.440	84.12
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44Unit	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.840.000 atau realisasi sebesar 22.56% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan atau service perbaikan peralatan gedung kantor di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja sebesar 107 unit. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	150.000.000	33.840.000	22.56
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	107 Unit	107 Unit	76.64

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 248.127.300 atau 99.25% dari target anggaran yang ada. Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan atau perbaikan gedung kantor di kecamatan dan kelurahan dengan target kinerja luas bangunan 7 Unit dan telah berhasil mencapai target dengan persentase kinerja sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	250.000.000	248.127.300	99.25%
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 Unit	7 Unit	100

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 17 (Tujuh Belas) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan pada Tahun 2024 dengan Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 29.564.223.620,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

Dengan Demikian dapat Diperoleh Serapan Anggaran Pada Kecamatan Bekasi Utara yang menunjang ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan tidak semua sub kegiatan mampu berhasil mencapai target kinerja yang ada. Adapun Persentase capaian keuangannya yang telah didapat yaitu sebesar

94.08% sedangkan persentase capaian kinerja berhasil memenuhi target yaitu 92.32% atau yang bermakna memuaskan. Dengan itu pengguna Anggaran tersebut dapat dikatakan Efisien karena Meskipun terdapat Sisa Anggaran pada Beberapa Kegiatan namun Capaian pada Anggaran tersebut Sudah Melampaui Target. Hal ini Dapat Diartikan Bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara sudah Meningkatkan dari Tahun Sebelumnya.

Beberapa Langkah-Langkah yang Akan dilakukan Pada Tahun 2024 untuk Meningkatkan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara adalah Sebagai Berikut :

- a) Lebih Meningkatkan lagi Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja agar Mampu Menyesuaikan dengan Standar yang telah ditentukan;
- b) Melakukan Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kinerja untuk Mewujudkan Capaian Kinerja yang Efektif dan Efisien. Dan dilakukan secara Berjenjang;
- c) Meningkatkan Kepedulian dan Pemahaman Kepada pada Pegawai atas Target Capaian yang telah ditetapkan dan diperjanjikan. Sehingga hasil Pengukuran Kinerja Pegawai dapat dimanfaatkan untuk melakukan *Rotasi/Mutasi* serta Pemberian *Reward/Punishment* Pegawai;
- d) Melakukan Reviu Terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Sasaran serta Target yang telah ditetapkan Setiap Tahunnya Sehingga Mampu Mendorong Peningkatan Capaian Kinerja;
- e) Meningkatkan Kompetensi SDM dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja agar Kualitas Kinerja Menjadi Lebih Relevan dan bermanfaat untuk Perbaikan Perencanaan Kinerja serta Peningkatan Capaian Kinerja;
- f) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan pada Dokumen Evaluasi Internal dengan Memperhatikan Target dan Realisasi Capaian, serta Mempertajam Analisis Pencapaian Kinerja sehingga dapat Diketahui Faktor Penyebab Kegagalan/ Faktor Penentu Keberhasilan yang sebenarnya pada setiap Triwulan.

3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat

3.2.3.1 Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

Pencapaian Sasaran Strategis Ketiga Kecamatan Bekasi Utara yaitu *Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat* dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara. Berdasarkan hasil capaiannya, Indikator Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	57%	60%	105.26%

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

Pada tabel 3.10 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis kedua yaitu **Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib** di Kecamatan Bekasi Utara, realisasi pada tahun 2024 terpenuhi mencapai 60% yang melebihi target, maka Capaian Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara telah tercapai dengan hasil sebesar 105.26% hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Bekasi Utara, dan jika dibandingkan sampai dengan target Renstra Tahun 2024-2026 untuk capaian indikator *Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib* di Kecamatan Bekasi Utara sebesar 105.26% sehingga untuk pemenuhan capaian target indikator sampai dengan kondisi akhir Renstra 2024-2026 yaitu sebesar 60%. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara terhadap Target Akhir RPJMD 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPD 2024-2026	TARGET RENSTRA TAHUN Ke		REALISASI CAPAIAN TAHUN Ke-		RASIO CAPAIAN TAHUN Ke -	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
			1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara	2.69	69%	80%	100%

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2024 capaian realisasinya sebesar 95.63% dari target yang ditetapkan, sehingga rasio capaiannya adalah 100% dan pada Tahun 2024 Indikator *Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib* di Kecamatan Bekasi Utara capaian realisasinya sebesar 95.63% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 sehingga rasio capaiannya sebesar 105.26% sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja dalam sasaran strategis yang dilaksanakan ditunjang dengan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator *Persentase Wilayah Tertib* dan pada tahun 2024 mampu tercapai dan memenuhi target.

Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Zonasi K3 yang baik}}{\text{Jumlah Seluruh Zonasi K3}} \times 100$$

Persentase *Peningkatan Wilayah yang Tertib* di Kecamatan Bekasi Utara terhadap terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Masyarakat mengalami kestabilan setiap tahunnya. Hal tersebut di dukung oleh adanya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 71.722.000 atau 95.63% dari target

anggaran yang ada, tidak dilakukan pencairan keseluruhan dikerankan Pencairan Mamin untuk Kegiatan Bangunan liar tidak ada setiap saat atau Penertiban Bangunan Liar tidak dilakukan setiap hari dan setiap minggu serta setiap bulan. Hanya pada waktu tertentu saja, Alokasi dari anggaran sub kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan dan penunjang kegiatan penertiban, sinergitas 3 pilar tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta penyediaan perlengkapan penunjang kegiatan penertiban dengan target kinerja 12 Laporan dan telah berhasil mencapai target dengan kinerja dengan persentase sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		%
		Target	Realisasi	
Masukan	Dana yang Dibutuhkan	75.000.000	71.722.000	95.63
Keluaran	Jumlah Laporan Kegiatan Penertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Utara	12 Laporan	12 Laporan	100

Sumber Data : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha, Diolah Tahun 2024

Sub Kegiatan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan langkah-langkah pelaksanaan guna keberlangsungan dan ketercapaian indikator yang ada, diantaranya;

- 1) Gerakan Kebersihan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan terdapat 3 zona yang termasuk dalam zona K3 yang baik dari 15 zona;
- 2) Jumlah titik zona K3 yaitu terdapat 26 Titik.

Selain itu, ketidakterpenuhinya capaian realisasi anggaran yang ada dikarenakan Penertiban PKL dan Bangli di laksanakan Tanpa Menggunakan Anggaran. Tidak mencapai target namun untuk capaian fisik atau kinerjanya dapat terpenuhi dengan hasil memuaskan. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Bekasi Utara melakukan beberapa upaya efisiensi yaitu :

1. Swadaya masyarakat dalam penyediaan alat kebersihan;
2. Keterlibatan semua unsur dalam giat bersih lingkungan sehingga tidak membutuhkan personel dari luar Kecamatan Bekasi Utara.

Zona tertib K3 di Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan zona yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 15 titik selama 5 tahun tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian secara internal terhadap zona-zona tersebut dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sepanjang periode Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 terdapat 15 titik yang menjadi target kinerja. Titik tersebut dibagi kedalam target tahunan. Setiap tahun, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya tertib K3 di titik yang ditetapkan tahun tersebut dan menjaga titik yang sudah berkategori K3 di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

Berikut zona tertib K3 pada tahun 2024 adalah diantaranya;

- 1) Jalan Baru Perjuangan Bekasi Utara;
- 2) Jalan Bringstone Bekasi Utara;
- 3) Jalan Jembatan 2 Wisma Asri Bekasi Utara;
- 4) Jalan Diklat Stasiun PT KAI Bekasi Utara;
- 5) Jalan PUP Kaliabang Tengah Bekasi Utara;
- 6) Jalan KH. Muchtar Tabrani Bekasi Utara;
- 7) Jalan Perjuangan sampai dengan Pertigaan Paku Jalan Kaliabang Tengah Bekasi Utara;
- 8) Jalan Pondol Ungu sampai Perempatan Jalan Nain;
- 9) Jalan Alinda sampai dengan Permata Bekasi Utara;
- 10) Jalan Harapan Kita Bekasi Utara;
- 11) Jalan KH. Muchtar Tabrani (Gedung PGRI) Bekasi Utara;
- 12) Jalan Perum Duta Harapan Kelurahan Harapan Baru Bekasi Utara;
- 13) Jalan Taman Wisma Asri Raya Teluk Pucung Bekasi Utara;
- 14) Pasar Teluk Buyung Jalan Perjuangan Marga Mulya Bekasi Utara;
- 15) Pasar Harapan Jaya Bekasi Utara.

Keberhasilan realisasi Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Utara yang nilainya sesuai target didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Giat bersih lingkungan yang rutin dilakukan Sepanjang Tahun 2024, Kecamatan Bekasi Utara melakukan giat bersih lingkungan (K3) di wilayah. Perwujudan keberhasilan Kecamatan Bekasi Utara dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat;
2. Sinergitas dengan 3 pilar serta Satpol PP dalam rangka penertiban, Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil Bekasi Utara serta Satpol PP wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.
3. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergi dengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor Kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupun sekitar kantor.

Tabel 3.10
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan
Bekasi Utara hingga Target Akhir Renstra
2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentasi Peningkatan wilayah yang Tertib
Target	Persen	57
Realisasi	Persen	60

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator *Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib* di Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2024 sebesar 60 persen. Kecamatan Bekasi Utara sudah mendapatkan capaian presentasi sesuai dengan target namun harus lebih di tingkatkankan lebih baik lagi. Dengan demikian langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Bekasi Utara untuk meningkatkan capaian kinerja, diantaranya :

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dalam giat bersih lingkungan ke jalan/titik utama di Kecamatan Bekasi Utara;
2. Penguatan sinergitas 3 pilar dan dalam mewujudkan zona K3;
3. Melakukan reviu terhadap instrumen penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Total Pagu yang Dikelola oleh Kecamatan Bekasi Utara sebesar Rp. 46.754.089.520,- (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah*) Realisasi sebesar Rp. 44.704.453.656,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) dengan Rincian Pagu Perprogram yaitu:

Tabel 3.11
Pagu Realisasi Sesuai dengan Emonev Perprogram
Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.564.223.620	27.813.220.986	92.32%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	380.000.000	339.533.550	89.35%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.694.865.900	16.440.838.620	98.48%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.000.000	71.722.000	95.63%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	39.138.500	97.85%
	TOTAL	46.754.089.520	44.704.453.656	100%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan ditetapkannya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatannya. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan PerProgram
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			NOMINAL	KEU %	FISIK %
1	KECAMATAN BEKASI UTARA	46.754.089.520	44.704.453.656	97.34	95.62%
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1)	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	0	0%	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.046.107.000	14.358.938.493	92.86%	95.43%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	1.984.750	66.16%	100%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	0%	0%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.909.200	99.55%	100%
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.321.500	302.987.400	94.59%	100%
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	71.132.750	71.13%	100%
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	100%	100%
5)	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	0	0%	100%
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000	138.168.000	86.36%	100%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	636.000.000	419.628.409	65.98%	100%
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.872.877.480	12.414.173.471	96.44%	100%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.000.000	70.914.800	61.67%	100%
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	244.694.000	205.826.440	84.12%	100%
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	33.840.000	22.56%	76.64%
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	248.127.300	99.25%	100%

1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000	15.499.000	51.66%	100%
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000	47.627.500	95.25%	100%
1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	140.000.000	134.717.250	96.23%	100%
2)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	644.007.000	542.033.100	84.17%	100%
3)	Evaluasi Kelurahan	60.000.000	0	0%	100%
1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.000.000	71.722.000	95.63%	100%
2	KELURAHAN PERWIRA				
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	48.508.000	97.02%	100%
2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.688.243.200	1.679.337.268	99.47%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
3	KELURAHAN MARGA MULYA				
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	45.544.000	91.09%	100%
3.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				

1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.287.943.980	1.283.859.100	99.68%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
4	KELURAHAN HARAPAN JAYA				
4.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	44.788.800	89.58%	100%
4.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.096.189.260	3.073.852.400	99.28%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
5	KELURAHAN HARAPAN BARU				
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	48.358.000	96.72%	100%
5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.617.675.020	1.597.605.800	98.76%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
5	KELURAHAN KALIABANG TENGAH				
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000	39.727.250	79.45%	100%
5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				

1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.331.815.240	3.311.864.302	99.40%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
5	KELURAHAN TELUK PUCUNG				
5.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
1)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	19.490.565	97.45%	100%
5.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.308.992.200	3.293.013.300	99.52%	100%
2)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100%	100%
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
		46.754.089.520	44.704.453.656	97.34	95.62%

Sumber : Bagian Keuangan Kec. Bekasi Utara

Realisasi Anggaran pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp 44.704.453.656,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam rupiah*) atau sebesar 95.62%, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 97.34%. Capaian kinerja pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan serta pekerjaan yang telah dilakukan secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan *output* dan *outcome*. Dalam pelaksanaan program kerjanya, Kecamatan Bekasi Utara ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024, total pagu yang dikelola oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebesar Rp. 46.754.089.520,- (*Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) dan realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp.44.704.453.656,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima*

Puluh Enam Rupiah). Rincian perbandingan antara Pagu Anggaran dengan Pagu Realisasi adalah sebagai berikut;

Tabel 3.13

Jenis Belanja Pada Kecamatan dan Kelurahan

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
BELANJA OPERASI	45.412.821.520,-
BELANJA MODAL	1.341.268.000,-
TOTAL	46.754.089.520,-

Sumber : Bag. Keuangan Kec. Bekasi Utara

Jenis Belanja dengan Pagu Terbesar pada Belanja Barang dan Jasa sebab Adanya Anggaran Kegiatan Yaitu Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Kegiatan Belanja Lansung Urusan (BLU) sebesar Rp.30.366.714.520,- (*Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) atau sebesar 95.57%, Jenis Belanja dengan Pagu Terkecil yaitu Belanja Pegawai Karena Termasuk kedalam Anggaran Penggajian Pegawai Aparatur dan Kepala OPD yaitu Sebesar Rp. 15.046.107.000,- (*Lima Belas Milyar Empat Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar 95.43% dan Belanja Hibah sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) atau Sebesar 0%. Dengan Uraian Diatas maka Jumlah Balanja Operasi Sebesar Rp.46.754.089.520,-

Gambar 3.2

Diagram Jenis Belanja Pada Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024



Sumber : Bagian Keuangan Kecamatan Bekasi Utara yang diolah

3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DATA

Berikut disampaikan Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya di Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun Anggaran 2024 pada Tabel 3.16

Tabel 3.14

Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bekasi Utara	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Bekasi Utara	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Utara	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	100%	100%	100%

Keterangan :

Capaian Kinerja = $\text{Realisasi Indikator} / \text{Target} \times 100\%$

Penyerapan Anggaran = $\text{Realisasi Keuangan Program} / \text{Kegiatan yang Mendukung Indikator}$

Tingkat Efisiensi = $\text{Penyerapan Anggaran} / \text{Target} \times 100\%$

Berdasarkan Tabel 3.4.1 diatas, Kecamatan Bekasi Utara dalam Tahun Anggaran 2024 telah Melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Presentasi Capaian yang Memuaskan, Terlihat pada Kolom Capaian Kinerja dengan Angka Presentase 100%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun Tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bekasi Utara atas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bekasi Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Bekasi Utara memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target.

Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun kedua periode Renstra 2024-2026. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. LKIP Kecamatan Bekasi Utara merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Bekasi Utara agar terjalin komunikasi yang baik;
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Bekasi Utara agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2024-2026 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2024 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang, diantaranya:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,- terserap sebesar 0% untuk Keuangan, dan Presentase Kinerja sebesar 100% Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan serta Kegiatan Cetak atau Foto copy dan Penjilidan sudah ada pada Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, mendapatkan Realisasi Keuangan sebesar 0% dan Kinerja 0%, dikarenakan pada sub kegiatan ini telah diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Bekasi;
3. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu mendapatkan realisasi Keuangan sebesar 0% dan Kinerja sebesar 100%, sub kegiatan ini tidak terealisasi pada keuangannya dikarenakan kegiatan untuk fasilitas kunjungan tamu di kecamatan bekasi utara sudah menggunakan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

- SKPD, serta sesuai dengan kebutuhan pada kecamatan bekasi utara;
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mendapatkan realisasi keuangan sebesar 22.56% dan kinerja sebesar 76.64%, sub kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan nota dinas yang diberikan oleh para pemegang kendaraan di kecamatan bekasi utara;
 5. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan tidak dilaksanakan. atau terserap 0% dikarenakan kecamatan tidak melakukan lomba evaluasi kinerja antar kelurahan. Karena Kecamatan Bekasi Utara tidak masuk dalam Nominasi penilaian Ekspose yang diadakan di Kota Bekasi oleh bagian Tapem. Karena sistem penilaian di tahun ini menggunakan sistem penunjukan sebagai perwakilan antar SKPD bukan sistem Lomba antar Kecamatan.

Demikian dari uraian di atas semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Untuk program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara pada Tahun 2024 menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang sehingga tidak mempengaruhi terhadap capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara secara keseluruhan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama Tahun 2024 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita. Aamiin.

Bekasi, 10 Januari 2024

CAMAT BEKASI UTARA,



SUMPONO BRAMA, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19800825 199912 1 001

